

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary*, United States of America: Thomson Reuters, 2009.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Asybah Wa Al-Nazha'ir*, Juz' 1, Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyah alSu'udiyah, 1997.
- Asshiddiqie, Jilmy, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jilmy, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azhari, M. Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001.
- Cahyono, Heru, *Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah Di Indonesia Pasca 1999*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006, Cetakan pertama.
- Estu Bagijo, Himawan, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UndangUndang*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2019, Cetakan ke tiga.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Cetakan ke tiga.
- Harman, Benny K, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung; Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Hsb, Ali Marwan, *Konsep judicial review dan pelembagaannya di berbagai negara*, Malang: Setara Press, 2017.
- Huda, Ni'matul, *politik ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundangan-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 1968.
- Ishom, Muhammad, *Pengantar Legal Standing Drafting*, Serang: IAIN SMHB, 2014.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nuansa dan penerbit Nusamedia, 2006, Cetakan pertama.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Luthfy, Riza Multazam, *Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Desa Ditinjau dari Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU Desa*, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017.

- M. Hadjon, Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administratif Law)*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2010.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Edisi pertama, Cetakan ke dua.
- Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Nasution, Adnan Buyung, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme; Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara*, (Serang: Fakultas syariah UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Rival, Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Siahan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi Kelima, Jakarta: UI Press 1993.
- Subarki, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia widiasarana indonesia, 2010.

Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Tim Penyusun, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa; Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.CL., Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteaan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2008.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta : Ichtiar, 1962.

B. JURNAL

Adeline Dyah Kasetyaning Putri, “Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1 No. 4, Universitas Sebelas Maret Jawa Tengah, 2022.

A Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan dalam System Pengembangan Hukum Islam”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* Vol 2 No. 02, November, 2016.

Adelina, Fransiska, “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No.1, Universitas Bung Karno, 2019.

Aziz, Machmud, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam System Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 No 5, Oktober, 2010.

Endah, Kiki, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol 5 No. 1 (2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh Jln. RE. Martadinata No 150 Ciamis.

Johansyah,”Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, (Mei. 2019) Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Kurniawati Ika dan Lusi Liany, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum* Vol. 10 No.1 (2019) Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta.

Maulidin, Laode, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perseleisihan Hasil Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Dan Putusan MK Dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 (2011) Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.

Qamar, Nurul, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No. 1 (November, 2012) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Siregar, Abdul Rahman Maulana, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5, No. 5 (2017) Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Suaahan, Maruarar, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, Agustus 2010.

Thalhah, HM, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen,” *Jurnal Hukum*, Vol.16 No. 3, (Juli. 2009) Jl. Gajah Mada No. 212-214 Bojonegoro Jawa Timur.

C. SKRIPSI, TESIS

Habibi, Afif, Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Skripsi Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum, 2014.

- Hildayani, Periodeisasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-undang nomor 06 tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Provinsi Banten), Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Mandasari, Zayanti, “Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi)” Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Swasono, Purna Hadi, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Widya, Rahadiyanti, “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa” Diploma thesis, Universitas Nasional, 2022.

D. UNDANG-UNDANG

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. AL-QURAN

Al-Qur'an Terjemaah dan Asbabun Nuzul, Terjemaah Tanpa Takwil Asbabun Nuzul Tematik dan Penjelasan Ayat Indeks Al Qur'an Terjemaah, Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.

F. INTERNET

Dian, Rositawati. 2007. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2007, Materi: Mekanisme Judicial Review”, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 <https://referensi.elsam.or.id/author/user26rostiwati/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, mkri.id (2015). diakses pada 8 Jan. 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>

Sri, Pujianti. 2021. MK Mengabulkan Sebagian Uji Aturan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa. Humas MKRI. Diakses pada 14 Juni 2022 dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2>

G. MAKALAH

Abdi, Mualimin, “Pemantapan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Judicial Review,” (Makalah, Bogor 3-5 November 2010).

Alrasid, Harun, “Masalah Judicial Review,” (Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang Judicial Review di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta: 2003).